

Judul : Warga perbatasan bangga, PLBN bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi
Tanggal : Minggu, 05 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Warga Perbatasan Bangga PLBN Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Heryawan mengingatkan soal pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga wilayah tersebut tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dia mengatakan, perbatasan jangan dianggap hanya sekadar pos lintas batas, dan tidak cuma kantor. Perbatasan harus berkontribusi nyata terhadap masyarakat, termasuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika hal tersebut berjalan, maka warga perbatasan akan bangga jadi warga Indonesia.

"Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga," ujar Heryawan, dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 itu mengingatkan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan yang memadai. PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung semata.

Senada, anggota Komisi II DPR Azis Subekti menilai, perlu kejelasan cetak biru pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Dia mencontohkan Pelabuhan Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang sampai saat ini belum memiliki kepastian pengembangan.

"Pelabuhan Sebatik ini harus jelas arahnya, apakah mau dikembangkan jadi pelabuhan besar atau sekadar pelabuhan penyeberangan. Jangan sampai

berhenti di wacana," ucap legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menambahkan, PLBN tidak boleh hanya berfungsi sebagai gedung administratif. PLBN harus menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang manfaatnya nyata bagi masyarakat perbatasan.

Deddy menyoroti banyak akses jalan ke PLBN yang bahkan belum ada, sedangkan sebagian lainnya masih berupa jalan tanah. Dia lantas mempertanyakan, bagaimana PLBN bisa berfungsi optimal jika jalannya saja tidak tembus.

"PLBN adalah wajah kedaulatan negara sekaligus pintu pertumbuhan ekonomi perbatasan," terangnya.

Selanjutnya, politikus PDIP itu juga menganggap, persoalan agraria di Kalimantan Utara masih jadi isu krusial yang perlu segera ditangani Pemerintah. Kompleksitas konflik lahan, tumpang tindih klaim masyarakat dengan perusahaan, serta ketidakjelasan status kawasan hutan berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun pertahanan di wilayah perbatasan.

"Kami mendorong reforma agraria tidak berhenti pada penerbitan sertifikat. Yang lebih penting adalah bagaimana redistribusi tanah dan legalisasi aset benar-benar memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut Deddy, hingga kini belum ada pola kerja sama inti-plasma antara perusahaan perkebunan di Kaltara dengan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan. ■ PVB